

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN PREPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini, yang berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Pengertian tinjauan pustaka menurut Black dan Champion (2009:296) merupakan gambaran yang menyeluruh dari setiap proyek penelitian. Tinjauan pustaka digunakan sebagai peninjau kembali pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang akan digunakan adalah beberapa teori yang mendukung masalah penelitian ini mengenai Tahapan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pengembangan Pipa Air (PDAM) kabupaten Bekasi.

2.1.1 Administrasi Bisnis

Administrasi Bisnis adalah ilmu sosial yang mempelajari mengenai proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam usaha guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, Administrasi Bisnis adalah ilmu yang fokus terhadap perilaku manusia.

Prof. Dr. Mr. S. Prajudi admosudidjo menyatakan Administrasi Bisnis adalah sebuah organisasi niaga secara keseluruhan serta mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang sifatnya bisnis objektif, serta Administrasi Niaga itu dijalankan oleh semua manager dalam sebuah organisasi niaga.

2.1.2 Ilmu Administrasi Bisnis

Ilmu Administrasi Bisnis merupakan sebuah elemen penting dalam setiap praktik bisnis dan termasuk sebagai kebutuhan wajib. Dalam pengertiannya, Ilmu Administrasi Bisnis mempunyai kaitan erat dengan aktivitas pelayanan, pengaturan, serta pengarahan berbagai jenis kegiatan perusahaan.

2.1.3 Pelayanan Air Bersih

Menurut Kotler dan Lukman (2000), pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Lukman berpendapat, pelayanan adalah suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima dan menggunakan.

Air adalah materi esensial didalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang beradada di planet bumi ini yang tidak membutuhkan air. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar makhluk hidup terutama manusia. Manusia membutuhkan air bersih untuk bertahan hidup. Tidak hanya itu, air juga berguna menunjang berbagai aktivitas kehidupan manusia, terlebih di era seperti sekarang ini dimana aktivitas kegiatan manusia semakin kompleks. Air

menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan dari berbagai aktivitas manusia. Air yang dibutuhkan oleh manusia pastinya adalah air bersih yang berkualitas. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan air bersih untuk menjamin keberlangsungan hidup, baik untuk pemenuhan kebutuhan air minum, pemenuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus), pemenuhan kebutuhan industry dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Air Bersih secara umum adalah air yang aman dan sehat untuk dikonsumsi manusia, tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak berasa, PH netral (bukan asam atau basa) dan tidak mengandung racun dan logam berat berbahaya.

2.1.4 Kemitraan Pemerintah Swasta

Kerjasama pemerintah dan swasta awal mulanya adalah untuk mengantisipasi pengadaan barang/jasa publik (public goods). Menurut Chang dan Rowthord (dalam Soesilo, 2003:7-1), ada banyak kekurangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, yaitu negara cenderung reaktif dan bukan proaktif terhadap pasar, kesulitan pemerintah dalam memantau pasar dan kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah akan berakibat lebih serius dari kegagalan yang dilakukan oleh swasta. Sementara itu teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa swasta itu: produktif, inovatif, efektif, dan cukup luwes dalam pelayanan sehingga sektor swasta dapat melayani secara lebih efisien dibanding pemerintah. Sektor swasta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum dapat tertangani oleh pemerintah, tanpa mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut yang menjadi alasan perlunya peran serta swasta dalam Pembangunan.

2.1.4.1 Definisi Kemitraan Pemerintah Swasta

Kemitraan antara Pemerintah dengan Swasta merupakan Kerjasama yang didasari atas kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam rangka menghasilkan suatu produk pelayanan public dengan adanya pembagian resiko, penyatuan sumberdaya dan pemenuhan tujuan Bersama. (Nurul Dwi Purwanti. 2021 : 180)

Kerjasama Pemerintah Swasta adalah suatu Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan tol, energi listrik dan air minum antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing. Kerjasama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi, meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (Bappenas, 2009).

2.1.4.2 Tahapan – Tahapan Umum Kemitraan Pemerintah Swasta

Menurut Nurul Dwi Purwanti (2021 : 189), Pola Kemitraan dengan cara pemilihan pihak swasta, melalui tahap – tahap umum kemitraan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I : Identifikasi Proyek

Tahap identifikasi berisikan kegiatan menganalisis untuk dapat menyimpulkan perkiraan kelayakan teknis, ekonomis, perkiraan keuangan proyek dan alternatif – alternatif yang dapat direkomendasikan bagi tindak lanjut kemitraan.

- a. Identifikasi permintaan dan mengantisipasi pertumbuhan permintaan atas fasilitas pelayanan yang akan dimitrakan.
- b. Penyiapan kerangka acuan studi pendahuluan kelayakan. Dalam tahapan ini, diidentifikasi Batasan – Batasan proyek yang diminati pihak swasta, mengidentifikasi masalah, tujuan dan kendala yang akan dihadapi sebelum dan dalam proses pelaksanaan proyek.
- c. Pengerjaan stdui kelayakan meliputi kajian terhadap latar belakang proyek, kondisi fisik dan social ekonomi target group, system fasilitas pelayanan public, penelitian dan dampak lingkungan, evaluasi perancangan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan, perkiraan biaya proyek dan pendapatan yang dihasilkan dan analisis keuangan dan ekonomi.

2. Tahap II : Pemilihan Mitra Usaha

Pada Langkah ini, dilakukan seleksi dan prakualifikasi pihak – pihak swasta yang akan dijadikan mitra pada proyek penyediaan fasilitas pelayanan yang dimaksud.

3. Tahap III : Penyiapan Perjanjian

Pada tahap ini, akan dirinci pokok kontrak perjanjian terutama yang menyangkut kontrak “ambil dan bayar” (“Take or Pay Contract”) khususnya yang menyangkut dampak keuangan dan resiko serta mempertegas posisi masing – masing pihak yang terlibat, baik dari segi tanggung jawab, fungsi dan peran masing – masing.

4. Tahap IV : Pembangunan Kontruksi

Tahap Pembangunan kontruksi dilaksanakan setelah adanya kesepakatan atas perjanjian Kerjasama untuk mengadakan proyek fasilitas pelayanan. Dalam agenda ini, pemerintah daerah dapat membentuk panitia pengawas untuk mengawasi jalannya proyek ini, mulai dari pengurusan izin sampai fasilitas selesai dibangun.

5. Tahap V : Pengelolaan

a. Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Proyek

Tahap evaluasi dilakukan pada tahap akhir Pembangunan proyek, sehingga dapat dirincikan kekurangan dan kebermanfaatan dari proyek untuk menunjang pelaksanaan pelayanan. Sebelum tahapan evaluasi pada umumnya dilaksanakan pengawasan Ketika proyek sedang berjalan sehingga dapat diketahui kekurangan dan hambatan apa saja yang telah dan akan dihadapi untuk meminimalisir kemungkinan yang akan menghambat berjalannya proyek.

b. Penerbitan Sertifikat Lulus Uji Coba

Setelah adanya evaluasi dan standarisasi dari uji coba. Jika telah layak, maka terdaftar dalam lulus uji coba dan diberikan sertifikat.

c. Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pemeliharaan dapat mengurangi biaya penyusutan atas produk maupun fasilitas yang mampu menunjang proses pelaksanaan pelayanan.

d. Pengawasan Periodik Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pengawasan periodic menjadi bagian dari proses pemeliharaan, sehingga Ketika terdapat pengurangan kualitas dari fasilitas, dilakukan perbaikan dan renovasi agar fungsinya tetap dimanfaatkan secara maksimal.

e. Persiapan Penyerahan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Persiapan ini menyangkut pengumpulan data – data mengenai sarana dan prasarana berikut dengan fungsi dan kebermanfaatannya. Proses penyerahan pengelolaan sarana dan prasarana biasanya diatur dalam keepakatan Kerjasama antar Pemerintah dengan pihak Swasta.

f. Penerbitan Sertifikat Penyelesaian Pengelolaan.

Penerbitan ini diberikan setelah melalui beberapa rangkaian tahapan – tahapan dan proses yang memiliki standarisasi tersendiri.

6. Tahap VI : Penyerahan Alih Milik atau Negosiasi Baru

Dalam mekanisme pengelolaan atau alih Kelola PPP ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan :

a. Persiapan Studi Kelayakan Bagi Pengalihan Pengelolaan

Pada dasarnya pemerintah daerah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu secara langsung mengambil alih pengelolaan sarana dan prasarana atau dapat memperpanjang pengelolaan dengan pihak swasta lainnya. Untuk membantu dalam memilih pilihan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan studi kelayakan antara lain :

1. Pengkajian tingkat dan arus kas
2. Pengkajian atau usia proyek yang masih dinilai ekonomis
3. Kajian atas usaha peralatan, sarana dan prasarana
4. Kajian atas biaya untuk memenuhi pengambilan investasi
5. Kemampuan aspek finansial pemerintah daerah
6. Kajian atas kemampuan pihak swasta.

b. Penyerahan Alih Milik Langsung Kepada Pemda

Kerjasama memiliki aturan waktu sesuai dengan kesepakatan, apabila perjanjian tersebut tidak diperpanjang, maka pihak swasta menyerahkan semua saran dan prasarana pada waktu berakhirnya perjanjian Kerjasama kepada pihak pemerintah daerah dalam keadaan baik dan dapat dilanjutkan untuk dikelola.

c. Penetapan Perjanjian Kerjasama Baru

Apabila pengelolaan dapat dilanjutkan oleh pihak swasta yang lama, maka perlu dilakukan perpanjangan kontrak dan apabila perlu adanya pembentukan kontrak baru, maka proses selanjutnya adalah dengan hasil dari pelaksanaan seleksi pihak swasta baru.

d. Proses Seleksi Pihak Swasta Bagi Pengoprasian Tahap Berikut.

Tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan Langkah pemilihan yang di pilih pihak swasta

e. Penyiapan Kesepakatan Baru

Persiapan rancangan perjanjian dan negosiasi dan penandatanganan perjanjian Kerjasama baru dengan pihak swasta yang lama ataupun dengan pihak swasta yang baru terpilih dari hasil seleksi.

Tercapainya Upaya – Upaya yang telah disebutkan diatas perlu didukung dengan beberapa tahapan. Terdapat empat (4) yang harus dilakukan pemerintah daerah/kota untuk tercapainya kesepakatan Kerjasama antara pemerintah dan swasta menurut (Riyanto, 2007) yaitu:

a. Persiapan proyek

Persiapan proyek merupakan tahapan awal dari rencana pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta. Pendekatan yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah a). identifikasi dalam hal ini mengacu pada beberapa hal yaitu mengenai baik atau buruknya sarana dan prasarana kota, modal dan tarif cakupan pelayanan yang ada, keadaan kepuasan konsumen secara menyeluruh serta perbandingan pendapatan dan biaya yang ada. b). penentuan tujuan, dalam kerjasama ini harus ada kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi perbaikan pelayanan, perluasan cakupan ataupun peningkatan standar pelayanan. c). pembentukan tim pengkaji, tim pengkaji dibentuk ketika hasil dari identifikasi pelayanan dan penentuan tujuan, merekomendasikan perlunya keterlibatan pihak swasta. Tugas tim pengkaji adalah menilai kelayakan usulan atau proposal kerjasama yang diajukan pihak swasta. Penilaian proposal ini dilihat dari segi teknologi yang akan digunakan,

struktur pembiayaan, aspek sosial, politik maupun hukum dan perundangan (Aspek Teknis, non Teknis maupun Keuangan).

b. Analisa pemeliharaan bentuk kerjasama pemerintah swasta

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan yaitu menilai kelayakan usulan atau proposal kerjasama yang diajukan oleh pihak swasta. proposal ini berupa penentuan model kerjasama pemerintah swasta, jangka waktu kerjasama, keuntungan dan kerugian tarif, kontribusi, tantangan serta hambatan dalam kerjasama pemerintah swasta. dalam hal ini aspek kelembagaan dan dasar hukum pemerintah sebagai provider harus cermat dalam memilih sistem kerjasama apa yang akan digunakan dengan segala pertimbangan.

c. Membuat hubungan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan. Mendirikan kerjasama antara pemerintah dan swasta merupakan kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.3 Public Privat Partnership (PPP)

Public Privat Partnership (PPP) sebagai salah satu bentuk dari *Collaborative Governace* merupakan suatu bentuk hubungan kelembagaan antara pemerintah dan swasta, yang didasari oleh objek, komitmen kerjasama dan tiap pihak menerima resiko sesuai dengan pendapatan dan biaya. (Nurul Dwi Purwanti 2021 : 175).

Adapun bentuk – bentuk *Public Privat Partnership* (PPP) adalah sebagai berikut :

- a. *Build Operate Transfer* (BOT) adalah pemberian konsensi kepada swasta selama periode tertentu. Swasta membangun, termasuk pembiayaan dan mengoperasikan infrastruktur, kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah masa kontrak berakhir.
- b. *Build Operate Lease Transfer* (BOLT) yaitu pemerintah menyerahkan asset berupa tanah atau lahan kepada pihak swasta untuk dibangun, dikelola (termasuk menyewakan kepada pihak lain) selama waktu tertentu, kemudian menyerahkan Kembali kepada pemerintah setelah habis masa kontrak.
- c. *Build Owns Operate* (BOO) yaitu memberikan konsesi, investor punya hak mendapatkan pengembalian investasi, keuntungan yang wajar sehingga investor dapat menarik biaya dengan persetujuan pemerintah dari pemakai jasa infrastruktur yang dibangunnya.
- d. *Build Own Operate Transfer* (BOOT) yaitu swasta membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola dan menghimpun pembayaran dari pengguna infrastruktur dan pada akhir hak guna pakai Kembali menjadi hak milik pemerintah (Supriyatna, 2010).
- e. *Build Transfer* (BT) yaitu sesuatu yang disepakati dalam kontrak perjanjian setelah konstruksi proyek selesai, swasta menyerahkan kepada pemerintah. Pemerintah diwajibkan membayar kepada swasta sebesar nilai investasi yang dikeluarkan ditambah keuntungan wajar. (Noor, 2011).

2.1.5 Investasi Kemitraan Pemerintah dengan Swasta

Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi disuatu wilayah atau daerah. Investasi merupakan factor yang mempengaruhi Pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi input dan output tersebut salah satu yang dihasilkan oleh manusia didalamnya. Investasi merupakan factor krusial bagi keberlangsungan proses Pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan, meningkatkan permintaan pasar (Tambunan, 2011).

Beberapa hal yang penting dalam model Kemitraan Pemerintah Swasta yaitu:

1. Pendanaan Pihak Swasta

Pelaksanaan kontrak dengan model *Public Privat Partnership* tentu harus mempersiapkan modal dan aswt baik berupa uang, barang dan jasa yang dijadikan sebagai nilai tawar dengan prinsip saling menguntungkan, sehingga masing – masing pihak mau mengadakan perjanjian tersebut.

2. Pengoperasian Fasilitas atau Sistem

Pada *Public Privat Partnership* pihak swasta setelah membangun proyek tersebut kemudia berhak mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu tertentu dan dengan pengoperasian

tersebut pihak swasta memperoleh keuntungan dan setelah jangka waktu yang disepakati kemudian proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta tanpa memperoleh pembayaran dari pemerintah.

3. Standar – Standar *Performance* yang disusun oleh Pemerintah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Kinerja (*performance*) sering diterjemahkan sebagai penampilan, prestasi kerja, tingkat keberhasilan ataupun pencapaian dari suatu target yang menunjukkan pelaksanaan hasil dari individu atau kelompok individu yang dinilai berdasarkan ukuran – ukuran dari suatu sistem pengukuran kinerja (Bastian, 2006).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti lakukan diharapkan menghasilkan sebuah penelitian yang komperenshif dan berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Tahapan Kerjasama Kemitraan Dalam Pengembangan Pipa Air Antara Perumda Tirta Bhagasasi Dengan Perusahaan Sukaresmi Putra Perkasa (swasta) di Kabupaten Bekasi ” ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka dasar berfikir dalam melakukan kajian.

Dalam hal ini, peneliti mengambil lima penelitian sebelumnya sebagai pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

1. Penelitian pertama diambil dari skripsi berjudul “*Public Privat Partnership* Dalam Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kota Makasar” yang dilakukan oleh Hardianto Somba mahasiswa studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tahapan Kerjasama Kemitraan Pemerintah Swasta dalam pembangunan infrastruktur di Kota Makasar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema *Public Privat Partnership* dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di kota Makasar ini telah dilaksanakan dengan baik. Persamaan penelitian ini adalah membahas bagaimana skema *Public Privat Partnership*. Perbedaanya yaitu penelitian ini menggunakan objek pembangunan jalan tol, sedangkan peneliti meneliti pembangunan jaringan pipa air.

2. Penelitian kedua berasal dari jurnal online berjudul “Implementasi *Public Privat Partnership* dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara” yang dilakukan oleh Muh. Hidayat Djabbari, Alwi, Saddam Husain Tamrin mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Terbuka pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skema *Public Privat Partnership* dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema *Public Privat Partnership* dalam Pengembangan Pariwisata berhasil dilakukan dengan keberhasilan yang cukup signifikan. Persamaan penelitian ini adalah membahas bagaimana skema *Public Privat Partnership* dilaksanakan. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus di bidang pariwisata, sedangkan peneliti meneliti berfokus pada infrastruktur jaringan pipa air.

3. Penelitian ketiga berasal dari jurnal online yang berjudul “Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha” yang dilakukan oleh Nadya Eka Amalia Al`azza, Patricia Inge Felany pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama antara pemerintah dengan Badan usaha dalam pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal reaserch*. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kerjasama pemerintah dengan swasta berjalan dengan baik dan berhasil. Persamaan penelitian ini adalah penggunaan konsep yang digunakan yaitu *Public Privat Partnership*. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode *doctrinal research*, sedangkan peneliti meneliti menggunakan metode deskriptif.

4. Penelitian keempat berasal dari jurnal online yang berjudul “Analisi *Value For Money* Pada Evaluasi Kelayakan Infrastruktur Publik Kerjasama

Pemerintah Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru” yang dilakukan oleh Ananda Haryadi, Andewi rokhmawati dan Novita Indrawati Universitas Riau pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui skema KPBU dalam kerjasama pemerintah dengan swasta dalam sistem penyediaan air minum kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema KPBU berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya. Persamaan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sementara peneliti meneliti dengan metode kualitatif.

5. Penelitian kelima berasal dari jurnal online yang berjudul “Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha” yang dilakukan oleh Fenita Enggraini Mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Semarang Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang baik karena menjadi hal yang tepat dalam pemilihan pendekatan tata kelola. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan *Public Privat Partnership*. Perbedaannya adalah lokasi atau objek penelitiannya.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

1	Hardianto Somp "Public Privat Partnership dalam pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pemabangunan Jalan Tol Kota Makasar	Membahas Tahapan Public Privat Partnership	Pembangunan Infrastruktur Jalan TOL	Pelaksanaan Tahapan Pblc Privat Partnership pada penelitian ini berjalan lancar dan baik
2	Muh. Hidayat Djabbari, Alwi dan Saddam Husain Tamrin "implementasi Public Privat Partnership dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara"	Membahas Tahapan Public Privat Partnership	Penelitian ini berfokus pada bidang Pariwisata	Pelaksanaan Tahapan Public Privat Partnership berhasil dilakukan dengan keberhasilan yang cukup signifikan
3	Nadya Eka Amalia Al'azza, Patricia Inge felany "Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur daerah melalui Sistem Kemitraan Pemerintah Swasta	Penggunaan Tahapan Kemitraan Pemerintah Swasta	Penggunaan metode doctrinal research	Pelaksanaan Tahapan Kemitraan Pemerintah Swasta berjalan lancar dan baik.

4	Ananda Haryadi, Andewi Rokhmawati dan Novita Indrawati "Analisis Value For Money pada Evaluasi Kelayakan Infrastruktur Publik dengan Tahapan Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru	Mengetahui Tahapan Kerjasama antara Pemerintah dengan Swasta	Penggunaan Metode Kuantitatif	Tahapan Kemitraan Pemerintah Swasta berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya
5	Fenita Enggraini "Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Tahapan Kerjasama Pemerintah Swasta	Penggunaan Tahapan Kemitraan Pemerintah Swasta	Perbedaan pembahasan Tata Kelola	Penelitian ini menunjukkan hasil baik karena menjadi hal yang tepat dalam pemilihan pendekatan tata kelola

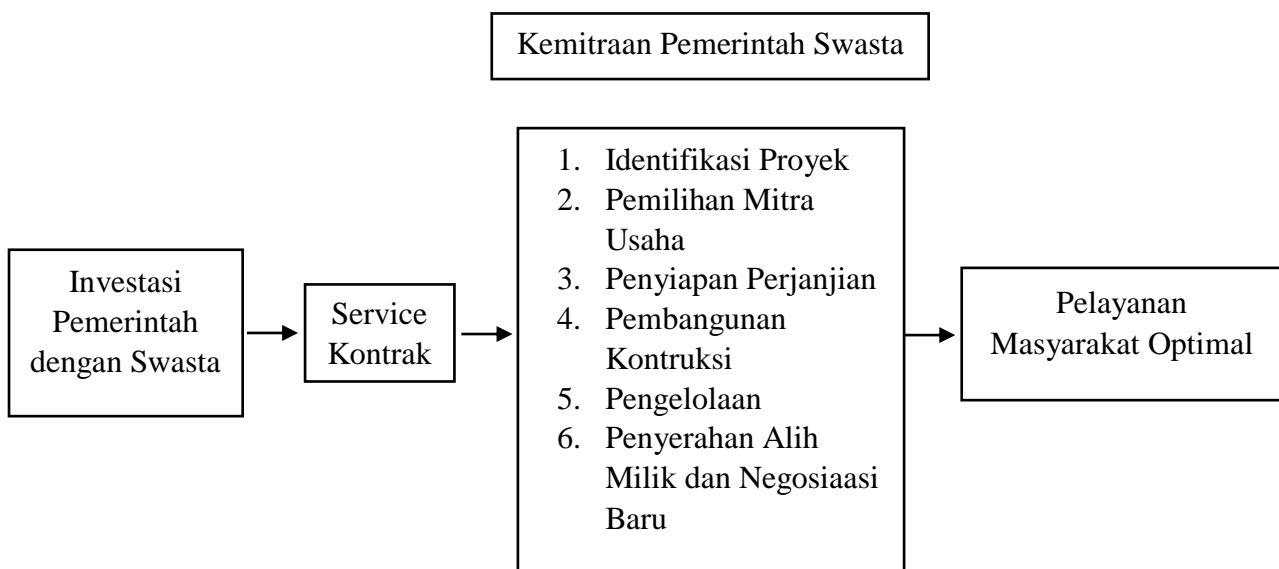
(Sumber : Olah Data Peneliti)

Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu diatas dapat dijadikan konsep bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini dan dalam membuat analisis. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi peneliti, agar peneliti ini dapat menyusun lebih baik dari peneliti sebelumnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Tahapan Kerjasama Pemerintah Swasta adalah suatu Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur seperti halnya jalan tol, energi listrik dan air minum antara pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam

negri ataupun badan usaha asing. Kerjasama tersebut meliputi pekerjaan kontruksi, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan Tahapan Kerjasama Pengembangan Pipa Air antara Perumda Tirta Bhagasasi dengan Sukaresmi Putra Perkasa (swasta) di Kabupaten Bekasi.



Gambar 2. 1: Bagan Kerangka Berfikir Tentang Tahapan Kerjasama Pemerintah Swasta

2.4 Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka peneliti mengemukakan proposisi sebagai berikut, yaitu :

1. Gambaran umum Perumda Tirta Bhagasasi dan Sukaremis Putra Perkasa (Swasta) sebagai mitra dalam pembangunan infrastruktur
2. Tahapan dalam kerjasama Kemitraan Pemerintah Swasta melalui 6 Tahapan, yaitu : 1). Identifikasi Proyek, 2). Pemilihan Mitra Usaha, 3). Penyiapan

Perjanjian, 4). Pembangunan Kontruksi, 5). Pengelolaan dan 6). Penyerahan Alih Milik atau Negosiasi.

3. Terdapat beberapa hambatan sehingga Kemitraan Pemerintah Swasta tidak berjalan secara efektif.